

**NAGARI KOTO GADANG KOTO ANAU PADA MASA PRRI  
(1958-1961)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana  
Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



**OLEH :**

**WIDIA FIRMAN**  
**NIM.18046093**

**DEPARTEMEN ENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

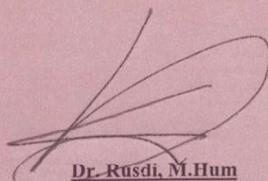
NAGARI KOTO GADANG KOTO ANAU PADA MASA PRRI (1958-1961)

Nama : Widia Firman  
NIM/BP : 18046093  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 September 2022

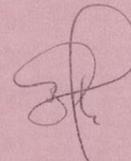
Disetujui Oleh :

Ketua Jurusan



Dr. Rusdi, M.Hum  
NIP.196403151992031002

Pembimbing



Drs. Zul Asri, M.Hum  
NIP.196006031986021001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji  
Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada Hari, 25 Agustus 2022

**NAGARI KOTO GADANG KOTO ANAU PADA MASA PRRI (1958-1961)**

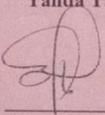
Nama : Widia Firman  
NIM/BP : 18046093  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 September 2022

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Drs. Zul Asri, M.Hum**

1. 

**Anggota : Drs. Etmi Hardi, M.Hum**

2. 

**: Dr. Rusdi, M. Hum**

3. 

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

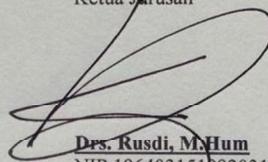
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widia Firman  
NIM/BP : 18046093  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Nagari Koto Gadang Koto Anau pada Masa PRRI (1958-1961)** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat dari orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti cara penulisan ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia di proses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui  
Ketua Jurusan

  
**Drs. Rusdi, M.Hum**  
NIP.196403151992031002

Saya yang menyatakan

  
**Widia Firman**  
NIM.18046093

## ABSTRAK

**Widia Firman.** 2018/18046093. Nagari Koto Gadang Koto Anau Pada Masa PRRI (1958-1961). *Skripsi*. Departemen Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Universitas Negeri Padang (UNP).

Penelitian ini mengkaji tentang peristiwa PRRI (1958-1961), fokusnya pada Nagari Koto Anau. Permasalahan penulis angkat dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana keterlibatan masyarakat Koto Anau dalam membantu perjuangan PRRI (1958-1961) (2) Apa konsekuensi keterlibatan tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Koto Anau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat Koto Anau dalam membantu perjuangan PRRI, serta mendeskripsikan konsekuensi keterlibatan tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yaitu melalui empat tahap meliputi, tahap pertama heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama heuristik, yaitu teknik mengumpulkan data, baik data itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Tahap kedua yaitu, kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Tahap ketiga yaitu, interpretasi merupakan tahap untuk menafsirkan dan menganalisis fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber. Tahap keempat, historiografi merupakan tahap kegiatan penulisan hasil penelitian sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nagari Koto Anau dijadikan sebagai tempat pengungsian. Sebagai sesama “urang awak”, masyarakat Koto Anau menerima orang-orang pengungsian tersebut dengan tangan terbuka. Setelah kedatangan tentara PRRI dan pengungsi ke Nagari Koto Anau, masyarakat ikut terlibat dalam membantu tentara dan pengungsi baik materi maupun secara tenaga. Konsekuensi dari keterlibatan masyarakat tersebut berakibat pada kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat Koto Anau. *Pertama*, dalam kehidupan sosial masyarakat begitu takut akan bahaya perang yang mengancam, mereka memilih untuk mengungsi ke daerah lain. Kehidupan sosial masyarakat Koto Anau berubah secara drastis ketika nagari berhasil dikuasai oleh APRI. *Kedua*, Saat pergolakan, kehidupan ekonomi masyarakat Koto Anau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena harga kebutuhan pokok mulai meningkat dan keadaan perekonomian di daerah semakin parah. *Ketiga*, kehidupan politik masyarakat Koto Anau tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat, mayoritas masyarakat Koto Anau pendukung Partai Masyumi. Disamping itu partai yang cukup berpengaruh adalah PKI.

**Kata Kunci** : Masyarakat, Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Politik, PRRI, Nagari Koto Anau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Nagari Koto Gadang Koto Anau Pada Masa PRRI (1958-1961)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik bantuan secara psikis maupun emosional seperti bimbingan, motivasi, dan pengarahan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu, memfasilitasi penulis, memberikan bimbingan serta memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Rusdi, M.Hum dan Bapak Drs. Etmi Hardi., M.Hum selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang sangat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rusdi, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah FIS UNP. Bapak/Ibuk dosen dan karyawan karyawan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang atas segala bimbingan dan bantuannya dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama peneliti menempuh pendidikan.ss
4. Ibu Dr. Erniwati S.S, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu, membimbing dan memberikan masukan sejak awal perkuliahan.
5. Bapak Edi Setiawan, A.Md sebagai Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau dan narasumber yang sudah bersedia membantu dan meluangkan waktunya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

6. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Firman dan Ibu Yurnita yang telah mencurahkan kasih sayang, pengorbanan dan juga do'a yang selalu tercurahkan, sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk mewujudkan cita-cita dalam meraih gelar Sarjana Pendidikan.
7. Saudara-saudara kandung penulis, terutama kakak Dian Fidya, S.Pd, Dian Fitri, S.Pd, Dian Ulya, Dian Rahmat, A.Md, Nia Diani, Junaidi dan adek Ikhsanul Fikri yang sudah memberikan dukungan moril maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Serta kepada teman-teman dan adik-adik yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Terkhususnya teman-teman angkatan 2018 yang senasib seperjuangan.

Semoga segala bimbingan dan bantuan Bapak/Ibu, keluarga, dan rekan-rekan berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa yang peneliti kemukakan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Aamiin ya Rabb.

Padang, 8 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Metode Penelitian.....	26
<b>BAB II GAMBARAN UMUM NAGARI KOTO ANAU SEBELUM PRRI</b>	
A. Kondisi Alam Nagari Koto Anau.....	28
B. Struktur Sosial Masyarakat Nagari Koto Anau .....	32
C. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Koto Anau .....	50
<b>BAB III NAGARI KOTO ANAU PADA MASA PRRI</b>	
A. Kedatangan Tentara APRI di Nagari Koto Anau.....	54
B. Perintah <i>Ijok</i> Masyarakat Koto Anau .....	58
C. Keterlibatan Masyarakat Koto Anau.....	60
D. Kehidupan Sosial Masyarakat .....	64
E. Kehidupan Ekonomi Masyarakat.....	66
F. Kehidupan Politik Masyarakat.....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>80</b>

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. 1 Peta Nagari Koto Anau.....	29
2. Gambar 2.1 Dokumentasi Rumah Ibu Lamiah Ahmad di jadikan Kantor Bintara Urusan Teritorial.....	81
3. Gambar 3.1 Dokumentasi Rumah H.M Thaib di Payobanda di tempati Komandan Kompi.....	81
4. Gambar 4.1 Tugu penaklukan APRI di Koto Anau .....	82
5. Gambar 5.1 Dokumentasi Wawancara dengan masyarakat Nagari Koto Anau .....	82
6. Gambar 6.1 Dokumentasi Wawancara dengan masyarakat Nagari Koto Anau .....	83
7. Gambar 7.1 Dokumentasi Wawancara dengan masyarakat Nagari Koto Anau .....	83
8. Gambar 8.1 Dokumentasi Wawancara dengan masyarakat Nagari Koto Anau .....	84
9. Gambar 9.1 Dokumentasi Wawancara dengan masyarakat Nagari Koto Anau .....	84
10. Gambar 10. 1 Surat Izin Penelitian .....	85
11. Gambar 11. 1 Surat Izin Penelitian dari Wali Nagari .....	86

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah selesai, namun demikian keadaan negara Indonesia belum bisa dikatakan normal sepenuhnya. Kekacauan yang masih melanda di berbagai daerah baik yang berlangsung dalam skala kecil maupun skala besar. Tidak hanya itu, pasca kemerdekaan para pemimpin hanya mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga banyak terjadi penyelewengan dalam birokrasi pemerintahan hal ini menambah persoalan yang ada.<sup>1</sup>

Periode sejarah tahun 1949-1959 ditandai dengan banyaknya kemelut yang terjadi di dalam negeri. Adanya percobaan perlawanan terhadap pemerintah pusat selalu dapat diatasi dengan kekuatan militer secara koersif. Salah satunya periode tahun 1958 sampai 1961 terjadi pembangkangan oleh daerah terhadap pusat yang digerakan oleh dewan-dewan di Sumatera.<sup>2</sup> Sumatera dalam beberapa hal berbeda dari masyarakat lain di luar Pulau Jawa. Meskipun luas daerah dan jumlah penduduknya relatif sedikit, namun orang Sumatera khususnya Sumatera Barat memainkan peran yang cukup penting dalam perpolitikan bangsa Indonesia.

---

<sup>1</sup> Kahin Audrey. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005)

<sup>2</sup> Idris Soewardi, *perjalanan Dalam Kelam ; Sinarai Kisah Pemberontakan PRRI* (Yogyakarta : 2008)

Persoalan di tingkat nasional pada tahun 1950-an muncul karena adanya kegagalan pembangunan ekonomi, kekacauan kondisi politik dan semakin meningkatnya kekuatan komunis di panggung politik. Salah satu tuntutan masyarakat daerah menentang kebijakan pemerintah pusat yang menyita perhatian pemerintah dalam kurun waktu adalah PRRI/PERMESTA. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) muncul akibat dari akumulasi dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah pusat sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan di berbagai bidang terutama di wilayah Sumatera yang belum berjalan dengan baik setelah hampir sepuluh tahun Indonesia merdeka.<sup>3</sup>

Kekecewaan ini memuncak pada tanggal 10 Februari 1958 ketika Dewan Perjuangan dipimpin oleh Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat di Jakarta. Isi ultimatum tersebut antara lain : 1) Meminta agar Kabinet Djuanda dibubarkan dalam waktu 5 X 24 jam serta mengembalikan mandat kepada presiden 2) Menunjuk Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru 3) Memberikan kesempatan kepada kabinet baru untuk bekerja sampai pemilu berikutnya 4) Presiden Soekarno/Pejabat Presiden membatasi diri menurut konstitusi 5) Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Dewan Perjuangan akan mengambil tindakan sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Zulneli Zubir, Iim Imaduddin & Lia Nalaria. *Peran Anak Nagari Situjuh Batua Kabupaten Kota Dana Peristiwa PDRI dan PRRI (1949-1966)* (Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2008) hlm., 64

<sup>4</sup> Mestika Zed, dkk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998) hlm., 146

Tanggapan Pemerintah Pusat terhadap ultimatum tersebut bertolak belakang dengan tuntutan tokoh-tokoh militer dan sipil, yaitu memecat langsung Kolonel Ahmad Husein, Zulkifl Lubis, Mauludin Simbolon, dan H. N. Samual dari jabatan mereka.<sup>5</sup> Pada tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perjuangan memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai jawaban atas ultimatum yang tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Ahmad Husein dengan bantuan tokoh-tokoh nasional seperti Sjafrudin Prawiranegara, M. Natsir, Burhanuddin Harahap dan Soemitro Joyohadikusumo membentuk Pemerintahan Tandingan serta memilih Mr. Sjarfuddin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri yang berkedudukan di Padang.<sup>6</sup>

Dua hari kemudian, para pemberontakan di Sulawesi bergabung dengan PRRI. Pembentukan PRRI juga mendapatkan dukungan dari Pejuang Semesta (PEMERSTA) di Sulawesi.<sup>7</sup> Setelah diumumkan PRRI Pemerintah Pusat didampingi KSAD Nasution memberikan perintah penangkapan terhadap para kolonel dan politisi yang mendukung PRRI dan PERMESTA. Bukan hanya itu pemerintah juga menuntut anggota Kabinet PRRI dan tokoh-tokoh PERMESTA agar menyerahkan diri kepada Pemerintah Pusat. Masalah utama yang menyebabkan gejolak di daerah ada dua hal utama, yaitu dualisme Soekarno-Hatta yang dianggap mampu

---

<sup>5</sup> Kahin, A. R. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Yayasan Obor Indonesia, 2005)

<sup>6</sup> Zed M., Utama, E., & Chaniago H *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998) hal 147

<sup>7</sup> Mestika Zed Dan Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang Biografi Ahmad Husein*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001) Hal 274

menyelesaikan masalah bangsa dan Dewan Nasional yang didominasi komunis. Selanjutnya masalah otonomi daerah, keuangan, perbaikan infrastruktur, dan stabilitas keamanan daerah yang tidak tertangani dengan baik. Berbagai upaya perundingan selalu gagal dan menemui jalan buntu, pemerintah pusat mengambil langkah penyelesaian dengan menggunakan kekuatan militer yang bertujuan untuk mewujudkan normalisasi pemerintah. Operasi militer merupakan langkah yang diambil untuk mewujudkan normalisasi pemerintahan.

Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) segera dipersiapkan untuk menumpas “Pemberontakan”.<sup>8</sup> Operasi militer pusat menumpas PRRI melibatkan satuan operasi militer. Serangkaian operasi yang dilakukan adalah Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Jendral Ahmad Yani untuk menguasai pusat komando PRRI di Sumatera Barat. Operasi Tegas yang dipimpin oleh Lektol Kaharudin Nasution untuk melumpuhkan kekuatan PRRI di Riau.

Operasi Saptamarga yang dipimpin oleh Brigjen Djatikusumo untuk menduduki Sumatera Utara. Dan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Lektol Dr. Ibnu Sutowo. Operasi militer dimulai pada tanggal 17 April 1958 pada bulan Ramadhan dengan membombardir dari laut, udara di Bandara Tabing, Ulak Karang Kota Padang. Setelah Padang dikuasai oleh Pemerintah Pusat tanpa mendapatkan perlawanan langsung dari pasukan PRRI, karena PRRI telah mundur ke arah Padang Panjang dan Solok melintasi Bukit Barisan.

---

<sup>8</sup> Zed M., Utama, E., & Chaniago H *Sumatera Barat di Pangung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998) Hal 148-149

Kota Padang sudah jatuh dan dikuasai penuh oleh tentara APRI, selanjutnya ibukota PRRI dipindahkan ke Bukittinggi.<sup>9</sup> Penduduk Kota Padang mulai mengungsi dan berbondong-bondong memadati jalan raya menuju daerah pegunungan yang ada di sekitar daerah Solok dan Padang Panjang. Wilayah pedalaman Kabupaten Solok seperti (Salayo, Koto Hilalang, Paninggahan, Gantung Ciri, Cupak, Sirukam) memiliki posisi yang sangat penting dalam perjuangan PRRI. Ahmad Husein sendiri mengundurkan diri ke daerah ini bukanlah secara kebetulan.

Sebelum Agresi Belanda II Ahmad Husein bermarkas di Solok memimpin Batalyon Harimau Kuranji mundur ke luar kota dan bergerilya. Ahmad Husein berada disana memimpin batalyonnya sampai angkat kaki. Dengan kata lain, Ahmad Husein mengenal betul medan Kabupaten Solok sampai ke hutan-hutannya. Daerah ini kaya akan beras, hasil peladangan penduduk juga banyak, sehingga akan mudah mendapatkan bahan makanan. Selain itu, hutan-hutan rimba yang lebat memudahkan melancarkan perang gerilya melawan pusat. Ahmad Yani sebagai pimpinan komando pasukan APRI menyadari kenyataan ini. Pada Agresi Militer Belanda yang kedua, Belanda merebut Solok dari dua arah ; pertama, menurunkan pasukan di Danau Singkarak (20 km di Utara Solok), dan menyerang Solok dengan pasukan infantri dari Lubuk Selasih (21 km dari Solok, 40 km dari Padang). Sebelumnya kota Solok ditembaki dari udara dan PRRI memperkirakan bahwa pola ini akan di tiru oleh Ahmad Yani.

---

<sup>9</sup> Soewardi Idris, *Perjalanan dalam Kelam; Senari Kisah Pemberontakan PRRI* (Yogyakarta : Beranda, 2008) hal 14

Solok memang mendapatkan tembakan dari udara, tetapi tidak langsung dari Padang ke Solok, mereka mengambil jalan ke arah kanan dari Lubuk Selasih. Setelah Alahan Panjang diduduki, barulah pasukan APRI dari Padang menduduki Solok melalui Lubuk Selasih. Pendudukan APRI atas kota-kota tersebut bukan berarti pasukan APRI dapat menguasai daerah secara keseluruhan, karena daerah-daerah pedalaman masih dalam kontrol PRRI dan dijadikan sebagai daerah kantong-kantong gerilya.<sup>10</sup>

Setelah Kota Solok diduduki tentara APRI, mereka sering mengadakan operasi militer ke nagari-nagari sekitar. Pada April 1958 tentara APRI mengadakan operasi militer ke daerah Solok bagian Selatan termasuk Koto Anau. Nagari Koto Anau adalah sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Talang berada dalam Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Talang, Nagari Batu Bajanjang dan juga Nagari Muaro Paneh di Kecamatan Bukit Sundi.

Di sebelah Timur berbatasan dengan Parambahan, Batu Karak, Dilam dan Nagari Batu Banyak. Di sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Cupak dan Sungai Janiah di Kecamatan Gunung Talang. Nagari Koto Anau yang berjarak sekitar 60 Km dari Padang. Pada masa itu banyak sekali jalan setapak. Satu-satunya jalan raya yang bisa dilalui mobil dari arah Utara hanya dari Solok dan dari arah Selatan hanya dari Alahan Panjang. Setelah APRI berhasil masuk ke Sumatera Barat, sekarang nagari-nagari pedalaman menjadi ramai oleh penungsi dari kota.

---

<sup>10</sup> Mestika Zed Dan Hasril Chaniago. *Ahmad Husein : Perlawanan Seorang Pejuang*. (Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan. 2001)

Baik oleh tentara maupun masyarakat sipil yang mendukung PRRI. Terutama nagari yang jauh ke tengah hutan menjadi ramai dan banyak penduduknya. Pada akhir April 1958 penduduk Nagari Koto Anau bertambah dengan pendaatang baru yang terdiri dari tentara PRRI yang mundur dari Padang dan ratusan pengungsi lainnya.<sup>11</sup> Ketika Nagari Koto Anau di jadikan sebagai tempat untuk pengungsian. Masyarakat Koto Anau mempunyai peranan untuk membantu tentara PRRI dan pengungsi dalam memenuhi kebutuhan logistik mereka dengan cara melakukan iuran. Kehidupan masyarakat Nagari Koto Anau sebagai petani dan berladang, ketika musim panen tiba para petani memberikan sumbangan dan bantuan uang yang jumlahnya tidak sedikit kepada tentara PRRI dan pengungsi.<sup>12</sup>

Serta para pengungsi juga dipersilahkan menghuni rumah-rumah penduduk tanpa bayaran. Sedangkan untuk makanan masyarakat setempat memberikan berupa nasi bungkus dan beras yang dimintakan secara bergiliran dari rumah ke rumah warga. Sebagai sesama “urang awak”, masyarakat Koto Anau menerima orang-orang pengungsian tersebut dengan tangan terbuka. Hal ini yang menyeret Nagari Koto Anau menjadi target operasi militer tentara pusat. Nagari Koto Anau pada masa PRRI sangat menarik dan penting untuk di teliti dalam kajian sejarah *Pertama*, selama ini penulisan peristiwa PRRI cenderung bersifat makro sehingga sejarah akar rumput yang dimulai dari daerah pedesaan masih belum terjawab

---

<sup>11</sup> Abraham Ilyas, *45 Kisah PRRI di Ranah Bunda : Tuan Sekata, Celaka Bersilang*. Lembaga Kekerabatan Datuk Soda. ISBN 978-979-97407-0-0

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak A. Hadi Rahman, 80 tahun (Saksi Sejarah di Nagari Koto Anau), 29 Januari 2022

dalam kajian sejarah lokal tentang peristiwa PRRI di Koto Anau. *Kedua*, Nagari Koto Anau terletak dalam posisi yang sangat strategis karena terletak di jalur persimpangan antara Muaro Paneh dan Cupak sehingga dapat di jadikan sebagai tempat pengungsian sementara.<sup>13</sup>

*Ketiga*, faktor ekonomi ini merupakan alasan paling penting karena tentara PRRI membutuhkan logistik selama perang berlangsung. Masyarakat Koto Anau yang kebanyakan bekerja sebagai petani sehingga kebutuhan logistik tentara PRRI dapat terpenuhi. Bukan hanya itu saja setiap hari kamis di pasar Nagari Koto Anau, Wali Nagari Koto Anau bersama bendaharanya mendatangi pasar bertujuan untuk mengumpulkan iuran perang. Setelah dana terkumpul biasanya Wali Nagari di kunjungi oleh pejabat militer PRRI serta membawa surat mandat yang sudah disahkan oleh bupati berupa permintaan dana untuk biaya staf Panglima Ahmad Husein di Kipek dan belanja kantor Bupati di Sirukam.<sup>14</sup>

Dan sebagian iuran yang terkumpul melalui Wali Nagari, ada juga dipakai untuk biaya penjuang yang akan menetap di Koto Anau atau yang sekedar lewat dalam perjalanan. Bantuan yang diberikan tidak dibedakan, apakah pengungsi sipil maupun tentara PRRI. Pergolakan daerah ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat Koto Anau. Bantuan baik dalam bentuk materi dan tenaga. Dalam bentuk materi masyarakat menyediakan beras, pakaian sekurang-kurangnya makanan dan nasi bungkus.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.,247

<sup>14</sup> Wawancara A. Hadi Rahman, 80 Tahun (Saksi Sejarah di Nagari Koto Anau), 29 Januari 2022

Sedangkan dalam bentuk tenaga, para pengungsi dan tentara-tentara itu sering diantar perbekalan oleh keluarga atau masyarakat. Di Nagari ini para pengungsian sudah merasa kurang nyaman dan merasa tidak enak dengan penduduk setempat. Karena selama di pengungsian, Nagari Koto Anau menjadi agak terganggu.<sup>15</sup> Tentara APRI mulai sering datang karena mereka sudah mengetahui banyak yang mengungsi disana. Suasana sudah tidak aman lagi, para pengungsi memutuskan pindah ke tempat lain. Pada awal tahun 1959 Nagari Koto Anau berhasil diduduki oleh tentara APRI yang berasal dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah.

Tentara APRI juga membentuk *Koterkej* (Komando Teritorial Kecamatan) tugu penaklukan Koto Anau oleh tentara APRI. Jumlah tentara APRI yang menduduki Koto Anau selama masa pergolakan banyaknya satu kompi beranggota 120, mereka adalah pasukan Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Ketika pergolakan terjadi, putra-putra Koto Anau banyak yang bergabung kedalam tentara Sukarela PRRI. Sewaktu Koto Anau diduduki APRI, para pejuang PRRI mundur ke nagari-nagari dan hutan-hutan yang ada di sekitar nagari Koto Anau.<sup>16</sup> APRI terus bergerak ke pedalaman dan berhasil menguasai daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat dijangkau berkat sekutunya OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat). Dalam setiap operasi, OPR juga memakai seragam yang di berikan APRI. Karena tugas dan diperintah untuk mengamankan PRRI hal ini yang membuat OPR dikenal kejam.

---

<sup>15</sup> Abraham Ilyas, *45 Kisah PRRI di Ranah Bunda : Tuan Sekata, Celaka Bersilang*. Lembaga Kekerabatan Datuk Soda. ISBN 978-979-97407-0-0. hlm.,20

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.,22

Hal ini menyebabkan posisi pemberontakan makin sulit, bahkan makanan dan pakaian sukar didapatkan. Perekonomian yang sebelumnya bergantung pada nagari-nagari juga di gagalkan APRI.<sup>17</sup> Pada tahun 1959 pemerintah melakukan *sanering*, pemerintah pusat menarik uang yang sedang beredar dan menggantinya dengan yang baru. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perjuangan PRRI di Sumatera Barat. Untuk keluar dari persoalan ini, Perdana Menteri Sjarifuddin Prawiranegara mengeluarkan uang PRRI seperti yang ia lakukan saat PDRI dulu. Karena keadaan ekonomi semakin memburuk maka para tentara PRRI dan pengungsi sering diantar pembekalan oleh keluarga mereka masing-masing yang perempuan yaitu ibu-ibu atau anak-anak mereka baik berupa sambal, beras atau pakaian.

Biasanya yang mengantar bekal berjumlah empat orang. Berangkat dari subuh dan kembali sore hari mereka menyamar sebagai petani yang pulang dan pergi dari sawah atau ladang, untuk menuju lokasi mereka melewati jalan yang biasa di lalui petani. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi tentara APRI. Sedangkan kehidupan sosial masyarakat pada saat itu berubah ketika Nagari Koto Anau berhasil dikuasai APRI. Dalam sehari-hari gerak masyarakat di batasi. Serta begitu banyak terjadi kekerasan yang terjadi dilakukan oleh tentara pusat bahkan muncul istilah 3B (Bawa, Bunuh, Bakar).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Soewardi Idris. *Antologi Cerpen Pergolakan Daerah Senari Kisah Pemberontakan PRRI*. (Yogyakarta : Beranda Publishing, 2008)

<sup>18</sup> Abraham Ilyas, *45 Kisah PRRI di Ranah Bunda : Tuan Sekata, Celaka Bersilang*. Lembaga Kekerabatan Datuk Soda. ISBN 978-979-97407-0-0

Oleh karena itu, terjadinya perubahan yang cenderung negatif terhadap aspek kehidupan masyarakat. Perang saudara ini dengan segala akibat yang di timbulkan akan selalu membawa penderitaan bagi masyarakat itu sendiri seperti banyaknya jatuh korban jiwa, masyarakat yang mati sia-sia, harta dirampas, berpisah dengan keluarga dan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Selama masa pergolakan daerah, kehidupan politik masyarakat Koto Anau tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat, mayoritas masyarakat Nagari Koto Anau mendukung Partai Masyumi. Di samping itu, partai lain yang cukup berpengaruh adalah PKI. Kehidupan politik di Nagari Koto Anau dapat dilihat dari keterlibatan wali nagari dalam memberikan informasi di kalangan masyarakat. Nagari Koto Anau pada masa PRRI dipimpin oleh seorang wali nagari yang bernama A. Rahman Ali Dt. Bagindo Rajo.<sup>19</sup> Sebagai wali nagari ia sangat mendukung pembentukan PRRI oleh Ahmad Husein. Namun setelah Koto Anau di kuasai APRI, politik di nagari pun berubah secara drastis. Penyebab ketidakstabilan Nagari Koto Anau yaitu meluasnya isu-isu operasi penggepungan terhadap daerah yang diduga sebagai tempat persembunyian pemberontakan. Peristiwa PRRI telah menimbulkan malapetaka dan menggoncang sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik serta kondisi psikologis masyarakat Nagari Koto Anau. Dengan keluarnya amnesti, abolisi dan jaminan keselamatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan PRRI dari

---

<sup>19</sup> Wawancara A. Hadi Rahman (saksi sejarah Nagari Koto Anau) tanggal 29 Januari 2022

pemerintah pusat, hal ini membawa angin segar dan harapan bagi terciptanya perdamaian.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peristiwa PRRI di Nagari Koto Gadang Koto Anau dengan judul Nagari Koto Gadang Koto Anau Pada Masa PRRI (1958-1961).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Kajian ini membahas tentang Nagari Koto Gadang Koto Anau pada masa PRRI. Mengingat keterbatasan baik kemampuan maupun waktu yang dimiliki. Agar penulisan proposal ini lebih terarah dan tidak mengambang maka penulis memberikan batasan. Batasan spasialnya adalah Nagari Koto Gadang Koto Anau dan batasan temporalnya adalah tahun 1958 sampai 1961. Tahun 1958 sebagai batasan awal, terutama sejak dirumuskan berdirinya PRRI oleh Ahmad Husein di Bukittinggi dan tahun yang sama PRRI masuk ke Nagari Koto Anau. Tahun 1961 merupakan batasan akhir, setelah dikeluarkannya amnesti abolisi oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat Koto Anau dalam membantu perjuangan PRRI (1958-1961)?
2. Apa konsekuensi keterlibatan masyarakat Koto Anau tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penulis kemukakan diatas, maka penulisan ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat dalam kajian sejarah.

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peristiwa PRRI di Nagari Koto Anau. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

- a. Mengungkap keterlibatan masyarakat Koto Anau dalam membantu perjuangan PRRI (1958-1961)
- b. Mendeskripsikan konsekuensi keterlibatan tersebut terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Penelitian ini juga ditunjukkan untuk memperkaya literatur tentang PRRI, terutama yang berkaitan dengan gambaran situasi ketika terjadinya pergolakan PRRI di Nagari Koto Anau. Persoalan PRRI tidak sekedar masalah ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat saja, tapi juga keterlibatan semua pihak baik elit maupun masyarakat biasa.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai gambaran tentang keterlibatan dan kehidupan masyarakat ketika pada masa PRRI di Nagari Koto Anau.

- b. Selain manfaat tersebut, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memperkaya literatur sejarah yang berbicara tentang nagari.

## **2. Manfaat Secara Praktis**

Tujuan praktis dari penulisan ini adalah mengenalkan peristiwa Nagari Koto Anau pada masa PRRI dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Studi Relevan**

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menunjuk beberapa penelitian terkait dengan topik yang diteliti. Penelitian tersebut antara lain:

Skripsi Hera Hastuti (2010) yang berjudul Nagari Paninggahan pada masa PRRI (1958-1961). Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan Nagari Paninggahan pada masa pergolakan PRRI dimana letak wilayah yang strategis, tekstur Nagari yang di pagari hutan-hutan yang lebat menjadikan Nagari Paninggahan sangat penting dalam masa pergolakan. Adapun keterkaitan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas mengenai peran dan kehidupan masyarakat yang terjadi selama PRRI (1958-1961).<sup>20</sup>

Skripsi Fajri Alfalah (2013), yang berjudul Nagari Pakan Sinayan pada masa PRRI (1958-1961). Skripsi ini menjelaskan tentang kehidupan

---

<sup>20</sup> Hera Hastuti, Nagari Paninggahan pada masa PRRI (1958-1961). *Skripsi*. (Padang : FIS Universitas Negeri Padang, 2010)

masyarakat Nagari Pakan Sinayan pada masa pergolakan PRRI baik itu dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu penulisnya juga menyimpulkan ada tiga golongan masyarakat Nagari Pakan Sinayan yang menanggapi PRRI. 1) pro dan kontra terhadap PRRI 2) Masyarakat yang lebih menghindar dan mengungsi. Adapun keterkaitan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah kesamaan kondisi politik, sosial, ekonomi masyarakat ketika terjadinya peristiwa perang.<sup>21</sup>

Skripsi Putri Syafriani (2014) yang berjudul Nagari Kayu Tanam Pada Masa PRRI (1958-1961). Skripsi ini menjelaskan dukungan masyarakat Nagari Kayu Tanam terhadap PRRI dan pengaruh dari peristiwa PRRI dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat Nagari Kayu Tanam serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat seperti pembunuhan, pemerasan, penulikan sehingga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Nagari Kayu Tanam. Adapun keterkaitan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah keduanya memiliki bahasan yang sama yaitu mengenai dukungan yang diberikan masyarakat terhadap PRRI dan kehidupan masyarakat ketika terjadi pergolakan PRRI di nagari.

Skripsi Odrian WD Putra (2019) yang berjudul Nagari Matur pada masa PRRI (1958-1961). Skripsi ini mengkaji mengenai kehidupan politik, sosial, ekonomi serta peranan Matur pada masa pergolakan daerah, PRRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Matur memiliki peranan sebagai salah satu basis tentara PRRI dan juga sebagai daerah penyangga bagi daerah

---

<sup>21</sup> Fajri Alfalah, *Nagari Pakan Sinayan Pada Masa Pergolakan PRRI (1958-1961)* 2013. Phd Thesis. Universitas Negeri Padang

pedalaman yang masih dikuasai oleh PRRI. Peristiwa PRRI juga mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Ada pun keterkaitan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah kehidupan masyarakat pada masa PRRI di nagari.<sup>22</sup>

Skripsi Fery Wahyudi (2021) *Pemilihan Nagari Batu Kambing Sebagai Tempat Tahanan PRRI*. Skripsi ini mengkaji tentang tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang pro tentara pusat masa PRRI di Nagari Batu Kambing Kabupaten Agam (1958-1961). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan Nagari Batu Kambing sebagai tempat para tahanan karena pada masa PRRI sudah berkejolak diberbagai daerah tentunya ada yang pro dan kontra terhadap PRRI. Orang-orang yang kontra terhadap tentara PRRI lebih memilih untuk memata-matai tentara PRRI menjadi musuh. Adapun kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas peristiwa PRRI di nagari.<sup>23</sup>

Skripsi Zarina Rahmi (2021) yang berjudul *Nagari Anduriang Pada Masa Pergolakan PRRI (1958-1961)*. Skripsi ini mengkaji tentang kehidupan masyarakat Nagari Anduriang pada masa PRRI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nagari Anduriang memiliki peran yang penting pada masa PRRI dan sebagai tempat bergerilya. Peristiwa PRRI juga sangat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat Nagari

---

<sup>22</sup> Odrian WD Putra, *Nagari Matur Pada Masa PRRI (1958-1961)*, Galanggang Sejarah, 2019,1.2 : 237-249

<sup>23</sup> Fery Wahyudi, *Pemilihan Nagari Batu Kambing Sebagai Tempat Tahanan PRRI*, Jurnal Kronologi, 2021, 3:1 298-308

Anduriang.<sup>24</sup> Adapun kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas kehidupan masyarakat serta peran elit tradisional pada masa PRRI (1958-1961).

Mestika Zed dalam “Sumatera Barat dalam Panggung Sejarah” (1998) menyatakan era pergolakan PRRI ditandai dengan ketidakpuasan daerah terhadap Pemerintah Pusat sehingga daerah membentuk kabinet sendiri dan era PRRI bagi masyarakat Sumatera Barat merupakan periode sejarah yang penuh benturan fisik maupun mental. Perang saudara ini di manfaatkan oleh PKI untuk mencari pengaruh dalam masyarakat Sumatera Barat.<sup>25</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Untuk memperjelas arah penelitian ini, ada beberapa konsep yang harus dijabarkan yaitu : PRRI, Nagari, Kehidupan Sosial Ekonomi dan Politik, Masyarakat, dan Elit Tradisional.

### **a. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)**

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan sebuah gerakan elit Minangkabau untuk melakukan perlawanan terhadap negara akibat ketidakharmonisan mereka atas dominasi Jawa dalam politik nasional, sehingga Sumatera Barat sebagai daerah basisnya. Banyak sumber yang berbicara mengenai PRRI, Sjafruddin Prawiranegara pada tanggal 15

---

<sup>24</sup> Zarina Rahmi, *Nagari Anduriang Pada Masa Pergolakan PRRI (1958-1961)*, Jurnal Kronologi, 2021, 3: 3 332-343

<sup>25</sup> Mestika Zed, Ddk. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001)

Februari 1958 menyatakan : “PRRI adalah hasil pemikiran dan tjita-tjita orang banyak. Ia tumbuh sebagai sebuah dari pengalaman jang pahit, jang dirasakan sedjak kita mentjapai pengakuan kemerdekaan dan sedjak kita berusaha untuk memberi isi terhadap kemerdekaan itu”.<sup>26</sup>

Dari pidato diatas bahwa PRRI bukan gerakan separatis seperti yang sering digeneralisasikan ke jenis pergolakan regional selama 1950-an dan setelah itu, melainkan “koreksi total dan keras” dari rezim pusat, yang dianggap melanggar konstitusi. PRRI tidak pernah menukarkan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya karena dorongan nasionalisme dan patriotisme mereka terpaksa angkat senjata, lagi pula prosedur konstitusional telah ditempuh. Menurut perdana menteri PRRI gerakan PRRI merupakan perjuangan yang lahir dari jiwa kritis masyarakat Sumatera Barat dalam melihat situasi politik yang mulai bergeser akibat kepentingan golongan lebih diutamakan dari pada kepentingan masyarakat dan keadaan pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah. Hal itulah yang membuat ketidakpuasan daerah sehingga melakukan koreksi terhadap pemerintah pusat.

Pernyataan yang diungkapkan Sjarifuddin Prawiranegara, Lerissa juga menyatakan bahwa “PRRI merupakan sebuah usaha untuk menggalang kesatuan diantara berbagai kelompok bangsa Indonesia yang menolak konsepsi Presiden Soekarno dan pengaruh komunisme dalam negara dan bangsa Indonesia. Menurut syamdani yang mengkaji PRRI apakah sebuah

---

<sup>26</sup> Sjafruddin Prawiranegara. 15 Februari 1958, Pidato Perdana Menteri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Naskah Tidak Diterbitkan.

pemberontakan atau pergolakan menyimpulkan, bahwa PRRI bukanlah pemberontakan tapi pergolakan.

Mengenai konsep PRRI masih banyak menuai perdebatan di berbagai kalangan. Sedangkan menurut masyarakat Sumatera Barat yang terlibat dalam peristiwa, PRRI adalah sebuah gerakan protes terhadap pemerintah pusat karena ketidakpuasan daerah terhadap situasi politik, ekonomi dan keamanan negara pada masa itu. Dalam gerakan PRRI tidak ada maksud untuk mendirikan negara dalam negara dan tetap mengakui NKRI, yang digugat adalah pemerintah pusat yang dianggap otoriter, sentralistik, eksploitatif dan dinilai gagal menjalankan roda pemerintahan serta melantarkan kepentingan dan aspirasi daerah, sehingga para pencetus PRRI terpaksa mengambil tindakan untuk mendirikan pemerintahan tandingan.

#### **b. Nagari dan Peran Nagari di Masa PRRI**

Istilah nagari sebagaimana yang dikemukakan oleh Datuak Batuah yang dikutip oleh Tsuyoshi Kato dalam bukunya *Adat Minangkabau Dan Merantau (dalam Perspektif Sejarah)* 2005, menyatakan: “Nagari adalah suatu unit teritorial yang mempunyai struktur politik dan aparat hukumnya sendiri. Nagari adalah unit pemukiman yang paling sempurna diakui oleh adat”.<sup>27</sup> Nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

---

<sup>27</sup> Tsuyosi Kato. *Adat Minangkabau Dan Merantau (Dalam Perspektif Sejarah)* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) hlm.,27

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat. Nagari dipimpin oleh seorang walinagari yang dipilih melalui musyawarah.<sup>28</sup> Mengenai pengertian nagari juga disampaikan oleh Ketua Daerah Sumatera Tengah, Letkol Ahmad Husein dalam sebuah pidato kompresi Pamong pada tanggal 5 Juni 1957 di Bukittinggi. Ia menyatakan “pembangunan harusnya di mulai dari dasar, yaitu nagari-nagari. Di situ kita mempunyai tempat tumpu yang kokoh dan teduh...”<sup>29</sup> Nagari adalah satu kesatuan yang sempurna, yang utuh, satu dalam daerah, satu dalam pemerintah, satu dalam administrasi, satu dalam agama, satu dalam ekonomi dan satu dalam susunan kehidupan masyarakat.

Peran nagari pada masa PRRI dapat dibagi menjadi dua. *Pertama* peran nagari sebagai tempat logistik makanan pasukan PRRI. Seperti dijelaskan dalam skripsi Hera Astuti (2010) Nagari Paninggahan Pada Masa PRRI, selain tempat mundurnya Ahmad Husein dan pasukannya, Nagari Paninggahan juga menjadi suplai makanan bagi pasukan PRRI karena di Nagari Paninggahan banyak menghasilkan beras. *Kedua* peran nagari sebagai tempat pengungsian dan basis pasukan PRRI. Dalam skripsi Deka Maita (2010) Nagari Mangopoh pada masa PRRI dikatakan bahwa Nagari Mangopoh merupakan tempat pelarian dari pasukan PRRI yang terdesak dari Pariaman, bersama masyarakat Nagari Mangopoh pasukan PRRI

---

<sup>28</sup> Navis A.A. *Alam Takambang Jadi Guru : Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. (Jakarta : Grafiti Press, 1984)

<sup>29</sup> Gusti Asnan. (Ed) *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah : Pemikiran Politik Orang Minang Tahun 1950-an* (Padang : Yayasan Citra Budaya, 2006) hlm.,46

kembali membangun perjuangan di nagari ini, hingga akhirnya Nagari Mangopoh jatuh ke tangan pemerintah pusat.

### **c. Masyarakat**

Masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan tertarik oleh suatu rasa idenitas yang sama.<sup>30</sup> Masyarakat nagari sebagaimana layaknya masyarakat desa di luar wilayah Minangkabau memiliki karakteristik yang sama dengan ciri-ciri masyarakat sebagai berikut :

1. Masyarakat masih sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam.
2. Proses sosial masih sangat berjalan lamban, karena beberapa faktor.
3. Masyarakat dalam menjalankan kehidupan berdasarkan pada sifat hubungan paguyuban, yang mana hidupnya berdasarkan pada ikatan kekeluargaan dan gotongroyong.
4. Sosial kontrol atau anggapan berdasarkan kepada moral dan hukum-hukum yang informal.<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinabungan dan terikat oleh suatu rasa identitas tertentu.

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi I*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2005) hlm.,114

<sup>31</sup> Nyoman Beratha (*Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*). Jakarta : Ghalia Indonesia

#### **d. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Konsep sosial, ekonomi dan politik sering dibahas terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk kepada objeknya yaitu masyarakat. Dalam KBBI, kata sosial ialah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” yang artinya keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan dan hukum. Secara garis besar kata ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat, antara lain yaitu sandang dan pangan.<sup>32</sup>

Konsep politik pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Menurut Delia Noer politik merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah, satu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>33</sup> Hakikat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas ataupun sikap yang tentunya akan mempengaruhi tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.

---

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta. Pt Granmedia, 1985) 35

<sup>33</sup> Nambo A.B (2005). *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik*. *Mimbar*, 21 (2) 262-285

#### **e. Elit tradisional**

Konsep elit tradisional atau elit nagari yang diperkenalkan oleh Vilfredo Pareto dalam buku Bottomore mengenai kelompok elit dan masyarakat. Elit merupakan sejumlah kecil individu yang memimpin puncak struktur sosial. Konsep ini dimaksudkan bukan untuk diuji kebenarannya tapi sebagai landasan guna memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat Nagari Koto Anau pada masa PRRI. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dikenal dengan istilah “*tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin*”. Istilah tersebut mengacu pada golongan adat (penghulu), golongan agama (alim ulama) dan golongan terpelajar (cerdik pandai) yang merupakan golongan elit tradisional dan berpengaruh di nagari.

Wali Nagari merupakan elit pemerintah secara resmi jika dilihat dari konstitusi negara. Wali Nagari dipilih oleh masyarakat secara demokratis, melalui undang-undang pemilu. Wali Nagari dapat diangkat elit tradisional maupun dari kalangan masyarakat biasa, asalkan pengangkatan dilandasi dengan konstitusi yang sah. Elit tradisional merupakan elit yang tidak bersifat resmi, pengangkatan elit tradisional hanya berdasarkan musyawarah kaum tanpa perlu dilandasi dengan konstitusi negara.

### **3. Kerangka Berpikir**

Untuk melihat kondisi yang dialami oleh masyarakat Nagari Koto Anau pada masa PRRI, dapat dilihat dari pemahaman tentang perang saudara (*Civil War*). Menurut Michael E. Brown (1996) dalam buku yang berjudul *The Internasional Dimension Of Internal Conflict* menyebutkan

perang saudara merupakan perang yang terjadi antara kelompok yang terorganisasi dalam wilayah yuridiksi suatu negara-bangsa (*intra-state conflict*). Perang dapat terjadi karena masalah internal negara dan mengubah kebijakan pemerintah.

Perang saudara merupakan sebuah konflik dengan identitas tinggi, melibatkan satuan keamanan bersenjata, yang berlangsung dan terorganisasi dalam skala besar. Dalam perang saudara berbagai tindak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran merupakan metode yang dipakai untuk mengalahkan pihak musuh.<sup>34</sup> Perang saudara banyak terjadi terutama untuk negara-negara yang baru merdeka, yang dalam proses pembentukan identitas negara dan bangsa (*state formation and national building*).

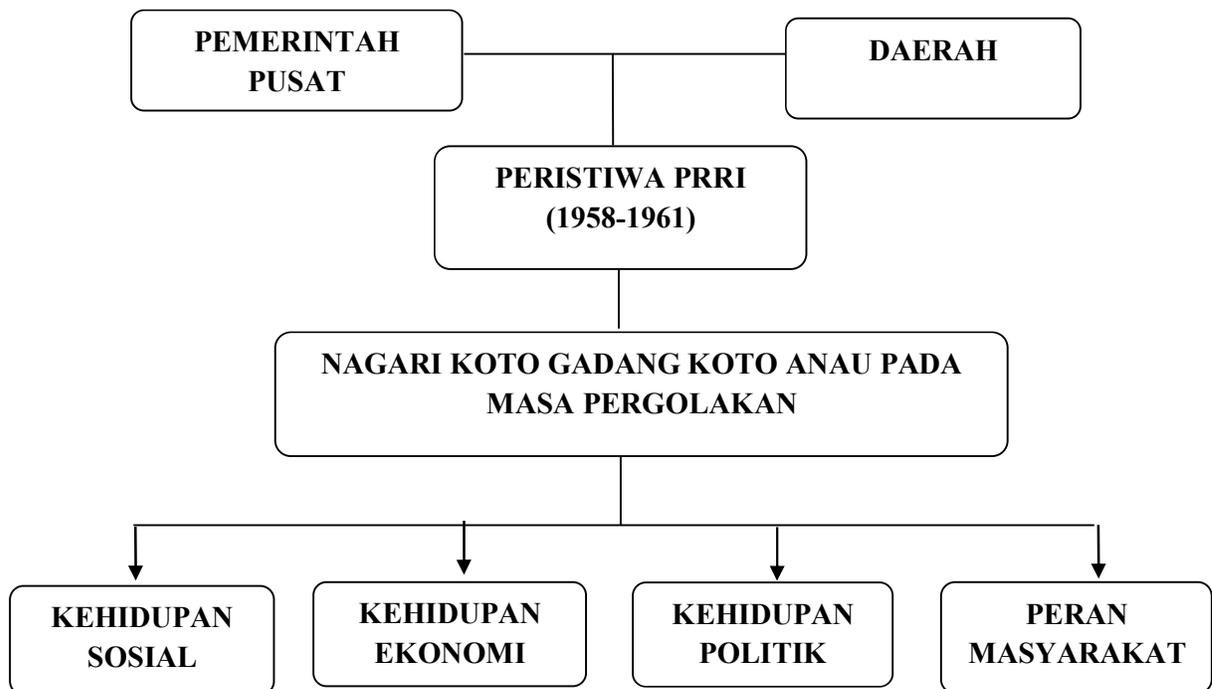
Dari definisi di atas diharapkan mampu menggambarkan kondisi masyarakat Nagari Koto Anau yang dilanda perang saudara, sehingga terlibat tingkat intensitas, aktivitas serta orientasi individu atau kelompok yang terlibat nantinya akan secara langsung atau tidak langsung akan mencerminkan jawaban masyarakat Nagari Koto Anau terhadap arus perubahan yang datang dari peristiwa PRRI berskala nasional ke dalam lingkungan lokal yang dalam tingkat tertentu telah meniptakan situasi konflik, keresahan-keresahan sosial serta ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Adanya konflik pada tatanan nasional membawa imbas terhadap masyarakat lokal, maka untuk penulisan sejarah tentang Nagari

---

<sup>34</sup> Michael E. Brown "Introduction" Dalam Michael E. Brown (Ed), *The International Dimensions Of Internal Conflict*. Massachusetts : Mit Press, 1996

Koto Anau pada masa PRRI dipakai teori konflik. Konflik adalah persepsi tentang perbedaan pandangan (*Perceived Divergence Of Interest*). Kepentingan adalah perasaan individu terhadap apa yang diinginkan, bersifat sentral dalam pikiran individu yang akan membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan intensitas. Konflik akan muncul ketika mereka mengidentifikasikan diri sebagai kelompok terpisah dari kelompok lain.<sup>35</sup>

Secara teoritis keterlibatan Nagari Koto Anau dalam pergolakan PRRI didasarkan pada perasaan kedaerahan (primodialisme). Pada awalnya masyarakat tidak terlalu peduli dengan PRRI. Namun, dengan adanya keterlibatan elit tradisional dalam mempropagandakan PRRI lambat laun masyarakat mulai mendukung PRRI sepenuhnya.



<sup>35</sup> Dean G. Bruit. *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1986)

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Kaedah dalam penulisan sejarah tersusun dalam empat langkah yaitu : Heuristik (mengumpulkan sumber), Kritik sumber, Interpretasi dan Historiografi.<sup>36</sup>

Tahap pertama *Heuristik*, pada tahap ini penulis mencari dan menemukan sumber-sumber atau data sejarah tentang peristiwa PRRI di Nagari Koto Anau. Sumber sejarah yaitu semua bukti-bukti peninggalan baik berupa sumber benda, maupun sumber lisan yang dapat dikategorikan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu berupa sumber lisan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat Nagari Koto Anau yang hidup sezaman yaitu bapak Abdul Rahman Hadi dan bapak Muhammad Alif dan Baida, Sariah, Basril, Yusrizal (saksi sejarah peristiwa PRRI di Nagari Koto Anau). Serta pihak-pihak mengetahui tentang peristiwa PRRI. Dengan wawancara lebih bernilai dalam memahami perbedaan-perbedaan antara pengungkapan secara lisan dan tekstual.<sup>37</sup> Disamping itu itu penulis juga menggunakan sumber sekunder untuk melengkapi data yang diperoleh dalam bentuk buku-buku, makalah, koran serta skripsi sebagai bahan relevan. Sumber relevan ini berasal dari perpustakaan terutama Ruang Baca Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

---

<sup>36</sup> Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. (Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1975)

<sup>37</sup> Kwa Hong Guan. Manfaat Kesaksian Lisan dan Kelisanan Dalam Rekonstruksi Masa Lampau. Dalam P. Lim Pui Huen, James H. Morrison, Kwa Chong Guan (Eds), *Sejarah Lisan Di Asia Tenggara; Teori Dan Metode* (hal 40). (Jakarta LP3ES, 1998)

Tahap kedua Kritik Sumber, merupakan pengujian sumber sejarah sudah bisa diketahui kebenarannya. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern.<sup>38</sup> Kritik eksternal digunakan untuk pengujian otentisitas (keaslian) materialnya, atau sumber harus utuh dan internal untuk menguji keabsahan isi informasi tentang peristiwa sejarah PRRI di Nagari Koto Anau.

Tahap ketiga Interpretasi yaitu data yang telah diperoleh dari lapangan, baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara, dianalisa sebab-akibat serta dikelompokkan berdasarkan objek yang diteliti. Tahap ini untuk menafsirkan dan menganalisis fakta sejarah yang telah ditemukan melalui proses kritik sumber, sehingga akan terkumpul bagian-bagian yang akan menjadi fakta. Dalam interpretasi ini, dilakukan dengan dua macam yaitu : analisis (menguraikan), dan sintesis (menyatukan) data. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan dengan teori-teori disusunlah fakta itu dalam sebuah interpretasi yang menyeluruh.

Tahap terakhir Historiografi yaitu data yang telah melalui tiga tahap sebelumnya kemudian dituliskan dalam bentuk karya penulisan. Dan tahap penulisan hasil penelitian sejarah secara deskriptif-analitis, berdasarkan sistematika dan kronologi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, Cetakan Pertama) hlm.,101-102

<sup>39</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori Dan Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm.,76